

## BAB V

### KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengujian hipotesis menggunakan uji statistik simultan (Uji F), diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  (4.066) lebih besar dari  $F_{hitung}$  (2.20) dengan signifikansi 0,021 (Sig.< 0,05) maka hipotesis diterima artinya Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan Pemda Kab/Kota di Sumatera Utara. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (UU No 33/2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah menjadi sumber keuangan daerah. pendapatan asli daerah dan belanja daerah akan sangat mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah
2. Kontribusi pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan hanya sebesar 8,8%. Sedangkan sisanya 91,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Keterbatasan data penelitian yang hanya tiga tahun sehingga belum dapat menyimpulkan hasil penelitian secara umum.
2. Keterbatasan dalam masalah penelitian yang hanya berkaitan tentang pendapatan asli daerah dan belanja daerah saja.

## 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian adalah :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan lebih jeli lagi untuk merealisasikan belanja daerah agar dapat meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel penelitian seperti dikaitkan dengan mur administratif Pemda, pajak daerah, retribusi, pertumbuhan daerah ataupun pertumbuhan ekonomi